

**GAGASAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SECARA *EX-OFFICIO* OLEH KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN/ATAU KETUA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Disusun oleh:

FENI EKA PUTRI

NO BP: 1410112105

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

No Reg. 5209/PK-V/III/2018

HALAMAN PENGESAHAN
No. Reg. 5209/PK-V/III/2018

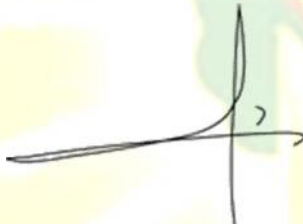
**GAGASAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SECARA *EX-OFFICIO* OLEH KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN/ATAU KETUA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH**

Disusun oleh:

FENI EKA PUTRI
1410112105

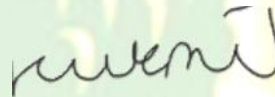
*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Juli 2018
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:*

Dekan



Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I



Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.H.
NIP. 197106301908021002

Pembimbing I



Didi Nazmi, S.H., M.H.
NIP. 1960121219870510001

Pembimbing II



Henny Andriani, S.H., M.H.
NIP. 197606211999032003

Penguji I



Andi Nova, S.H., M.H.
NIP. 197503182006041002

Penguji II



Beni Kharisma Arrasulli, S.HI, L.LM
NIP. 198303312015041001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala pujian penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Kemudian *shalawat* serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar umat manusia, Baginda Besar Nabi Muhammad saw yang telah membawa dan menuntun kita dari zaman kebodohan yang gelap gulita ke zaman penuh ilmu pengetahuan yang terang benderang ini.

Skripsi ini penulis beri judul **Gagasan Pengisian Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Secara *Ex-Officio* oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah** selain dijadikan suatu syarat untuk dapat menerima gelar Sarjana Hukum, juga dijadikan sarana penerapan terhadap ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan sebuah tempat istimewa bagi penulis untuk menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Ayah penulis, Amril Harun serta Mama penulis, Elly atas segala-galanya yang telah mereka berikan kepada penulis mulai dari restu, doa, perhatian, pikiran, dan materinya. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara penulis, Kakak Tuti, Abang Dodi, Bang Beot, Rivi, dan Rizi, tak lupa Bang Fery dan Kak Dian, terima kasih atas doa, perhatian, dan tegurannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Nazmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Henny Andriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, dan tidak lupa nasihat-nasihat tentang kehidupan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Charles Simabura, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis, terima kasih banyak atas pendampingan serta nasihat yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Tim Dosen Penguji skripsi penulis, baik pada saat Seminar Proposal ataupun saat Ujian Komprehensif, terima kasih atas nasihat, pemahaman, kritik, dan masukan yang diberikan demi sempurnanya skripsi ini;
4. Arfiani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Henny Andriani, S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta Dosen Bagian Hukum Tata Negara beserta karyawan terkhusus dosen yang mengajar mata kuliah wajib dan pilihan Program Kekhususan Hukum Tata Negara, terima kasih banyak atas dukungan, ilmu, dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis;
6. Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu, kasih sayang, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Kabinet Restorasi Mahasiswa, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengalaman, kasih sayang, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat berkembang di Kementerian Hukum, Perundang-Undangan dan Kajian Strategis;
8. Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Angkatan 2014, sampai berjumpa dalam keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang;

9. Marlita Rossyanti, Nanda Amalia, Fitriyah, serta teman-teman Motion Step 2014 dan All Holic 2011, terima kasih karena selalu menjaga komunikasi dan menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
10. Rekan-rekan seperjuangan, Dwiyanti Adesra Putri rekan penulis dalam LKTI Kompetisi Esai dan Karya Tulis Mahasiswa Nasional Universitas Hasanuddin 2015 (KERTAS UNHAS), serta Irma Suryani Syair dan Zammila Rizka (Kelompok Hery Maine) rekan penulis dalam KKI Social Science in National Law Competition Universitas Indonesia 2016 (SCIENCESATIONAL UI), pengalaman serta getaran kebanggaan yang penulis dapatkan bersama kalian tidak akan pernah penulis lupakan, terima kasih atas perjuangannya bersama membawa nama Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam kancah nasional, *Demi Kedjajaan Bangsa!*
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan kita disini, semoga kita semua dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang;
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, terima kasih telah menjadi kawan yang menemani hidup dengan segala suka dan duka yang terjadi disana;
13. Segala pihak yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Akhir kata, kami sebagai penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengharapkan berbagai kritik dan saran yang konstruktif demi manfaat dan kesempurnaan Skripsi ini.

Padang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Kedaulatan Rakyat	17
B. Pengertian Istilah <i>Ex-Officio</i>	20
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Legislatif di Indonesia	22
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	22
2. Dewan Perwakilan Rakyat	29
3. Dewan Perwakilan Daerah	32
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Pengisian Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	36
1. Pengisian Jabatan Pimpinan MPR Pada Awal Kemerdekaan (1945-1949).....	38
2. Pengisian Jabatan Pimpinan MPR Pada Masa Orde Lama (1959-1966)	41
3. Pengisian Jabatan Pimpinan MPR Pada Masa Orde Baru (1966-1998).....	43


4. Pengisian Jabatan Pimpinan MPR Pada Era Reformasi (1988-2004).....	49
5. Pengisian Jabatan Pimpinan MPR Setelah Perubahan UUD 1945 (2004-sekarang)	54
B. Urgensi Pengisian Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Secara <i>Ex-Officio</i> oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah	60
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Pengaturan mengenai MPR dalam UUD 1945.....	27
Tabel 2. Komposisi Pimpinan MPR Periode Keanggotaan 1987-1999	48
Tabel 3. Komposisi Pimpinan MPR Periode Keanggotaan 1999-2004	52
Tabel 4. Komposisi Pimpinan MPR Periode Keanggotaan 2009-2014	57
Tabel 5. Komposisi Pimpinan MPR Periode Keanggotaan 2014-2019	59



	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: FENI EKA PUTRI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Juni 1996 b) Nama Orang Tua: Amril Harun c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara e) No.Bp. : 1410112105	f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2018 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,62 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat : Kapalo Koto, RT 02 RW I Padang, Sumatera Barat	

GAGASAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SECARA *EX-OFFICIO* OLEH KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN/ATAU KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

(Feni Eka Putri, 1410112105, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 halaman, 2018)

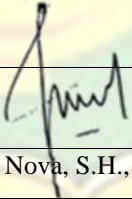
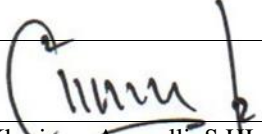
ABSTRAK

Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) sudah mengalami berbagai perubahan dari konsep awal pembentukannya sebagaimana proses perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Majelis ini pada awalnya merupakan sebuah Lembaga Tertinggi Negara dengan fungsi dan kewenangan yang sangat luas, sehingga banyak terjadi penyelewengan terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki lembaga ini yang pada akhirnya semakin dikurangi seiring dengan proses perubahan UUD 1945 yang kemudian menjadikan kedudukan MPR sejajar dengan Lembaga Negara lainnya yang diatur dalam UUD 1945 sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang dasar. Dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki sekarang, banyak pihak yang menyatakan bahwa sudah seharusnya lembaga seperti MPR ini dijadikan lembaga *ad hoc* tempat berkumpulnya DPR dan DPD dalam sidang-sidang MPR atau bahkan ada yang mengatakan bahwa MPR sudah seharusnya dibubarkan saja. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian secara normatif yang akan meneliti mengenai bagaimana pengaturan mengenai pengisian jabatan Pimpinan MPR selama ini dan bagaimana urgensi pengisian jabatan Pimpinan MPR itu sendiri. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa tidak ada keseragaman pengaturan mengenai pengisian jabatan Pimpinan MPR sehingga dijadikan sebagai ajang berbagi kekuasaan oleh para elite dikarenakan UUD 1945 pun tidak mengatur secara rinci bagaimana proses pengisian jabatan Pimpinan MPR tidak seperti Lembaga Negara lain yang proses pengisian jabatannya diatur dalam UUD 1945. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa jabatan Pimpinan MPR bisa saja dirangkap oleh Ketua DPR dan/atau Ketua DPD secara *ex-officio* karena pengaturan mengenai pengisian jabatan Pimpinan MPR merupakan *open legal policy*. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk praktik pemisahan jabatan pimpinan lembaga legislatif dicukupkan hingga keanggotaan 2014-2019. Untuk selanjutnya diharapkan gagasan ini dapat dibahas dan diterapkan dalam MPR keanggotaan 2019-2014.

Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pengisian Jabatan, *Ex-Officio*


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Andi Nova, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arrasulli, S.HI., L.LM.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: